



**REFORMASI PENGELOLAAN PASAR BLAMBANGAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*REFORMATION OF BLAMBANGAN MARKET MANAGEMENT IN
BANYUWANGI*

SKRIPSI

oleh
Mochammad Rifqi Riva
NIM 150910201056

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**REFORMASI PENGELOLAAN PASAR BLAMBANGAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*REFORMATION OF BLAMBANGAN MARKET MANAGEMENT IN
BANYUWANGI*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Mochammad Rifqi Riva
NIM 150910201056

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Istikhomariah dan Bapak Abdul Mu'id yang telah membesarkan penulis dengan segala kasih sayang, kesabaran dan selalu memberikan dukungan melalui do'a dan motivasi di setiap langkah penulis;
2. Adik tersayang M. Mughis Iqbal Maulana dan Hilya Zulfa Maliha yang selalu memberikan dukungan serta doanya;
3. guru-guru penulis di TK Al-Ihsan, SDN 1 Genteng Wetan, SMP Negeri 3 Genteng, SMK Muhammadiyah 1 Genteng yang telah mendidik penulis sehingga mampu menghantarkan ke bangku perkuliahan;
4. para Kyai dan Ustad serta keluarga besar pondok pesantren Tamrinatul Wildan tempat penulis menimba ilmu agama;
5. almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

HALAMAN MOTTO

“Rebahan memang nyaman, tapi membuat perubahan dengan segala pengorbanan
lebih dekat dengan kemuliaan”



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Rifqi Riva

NIM : 150910201056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Reformasi Pengelolaan Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan,

Mochammad Rifqi Riva

NIM 150910201056

SKRIPSI

**REFORMASI PENGELOLAAN PASAR BLAMBANGAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*REFORMATION OF BLAMBANGAN MARKET MANAGEMENT IN
BANYUWANGI*

Oleh:

Mochammad Rifqi Riva

150910201056

Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Pembimbing Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Reformasi Pengelolaan Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi” karya Mochammad Rifqi Riva telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 23 November 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Anwar, M.Si
NIP.196306061988021001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP
NIP. 198009172005012001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 196002191987021001

RINGKASAN

Reformasi Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi; Mochammad Rifqi Riva; 150910201056; 2020; 104 Halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sebagai upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pasar blambangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi bersama UPT pasar blambangan serius untuk meningkatkan pengelolaan di pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi dengan cara memperbaiki atau mereformasi sistem pengelolaan pasar. yaitu dari segi pelayanan publik, sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, pola pikir dan budaya kerja yang profesional. Upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar berjalan dengan cukup baik, banyak perubahan baik dari segi pelayanan publik, sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, pola pikir dan budaya kerja yang profesional. Selain itu upaya tersebut juga membuahkan hasil yaitu diraihnya juara 1 event festival pasar rakyat se Kabupaten Banyuwangi oleh pasar Blambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa reformasi pengelolaan pasar di pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Fokus penelitian ini adalah proses reformasi pengelolaan pasar di pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik penyajian dan analisis data menggunakan teknik analisis reduksi.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Reformasi Pengelolaan Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sutomo, M.Si, dan Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan, dorongan, semangat dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
3. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
4. Bapak Nawari, Bapak Suharjo, Bapak Suhernaji, selaku pegawai bidang pasar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang telah mengizinkan serta memberikan kemudahan data bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar;
5. Bapak Budi, Bapak Samsul, Ibu Dilla, dan Ibu Ira, selaku pegawai Kantor pengelolaan pasar Blambangan yang telah mengizinkan serta memberikan kemudahan data bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar;
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Istikhomariyah dan Bapak Abdul Mu'id serta adik tersayang M. Mughis Iqbal Maulana dan Hilya Zulfa Maliha

yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

7. Tim Rebahan (Arman, Agung, Agus, Gilang, Fathur, Nanda, Yazid, Ajeng, dan Woni) yang bersedia menjadi partner pendewasaan diri selama penulis kuliah;
8. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan kenangan yang berkesan selama penulis kuliah;
9. Pengurus HIMAISTRA periode 2018/2019 yang menjadi partner berproses di organisasi intra kampus;
10. Sahabat/i PMII Rayon Fisip yang telah memberikan banyak proses pendewasaan diri terhadap saya;
11. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Jember, 23 November 2020

Yang Menyatakan,

Mochammad Rifqi Riva

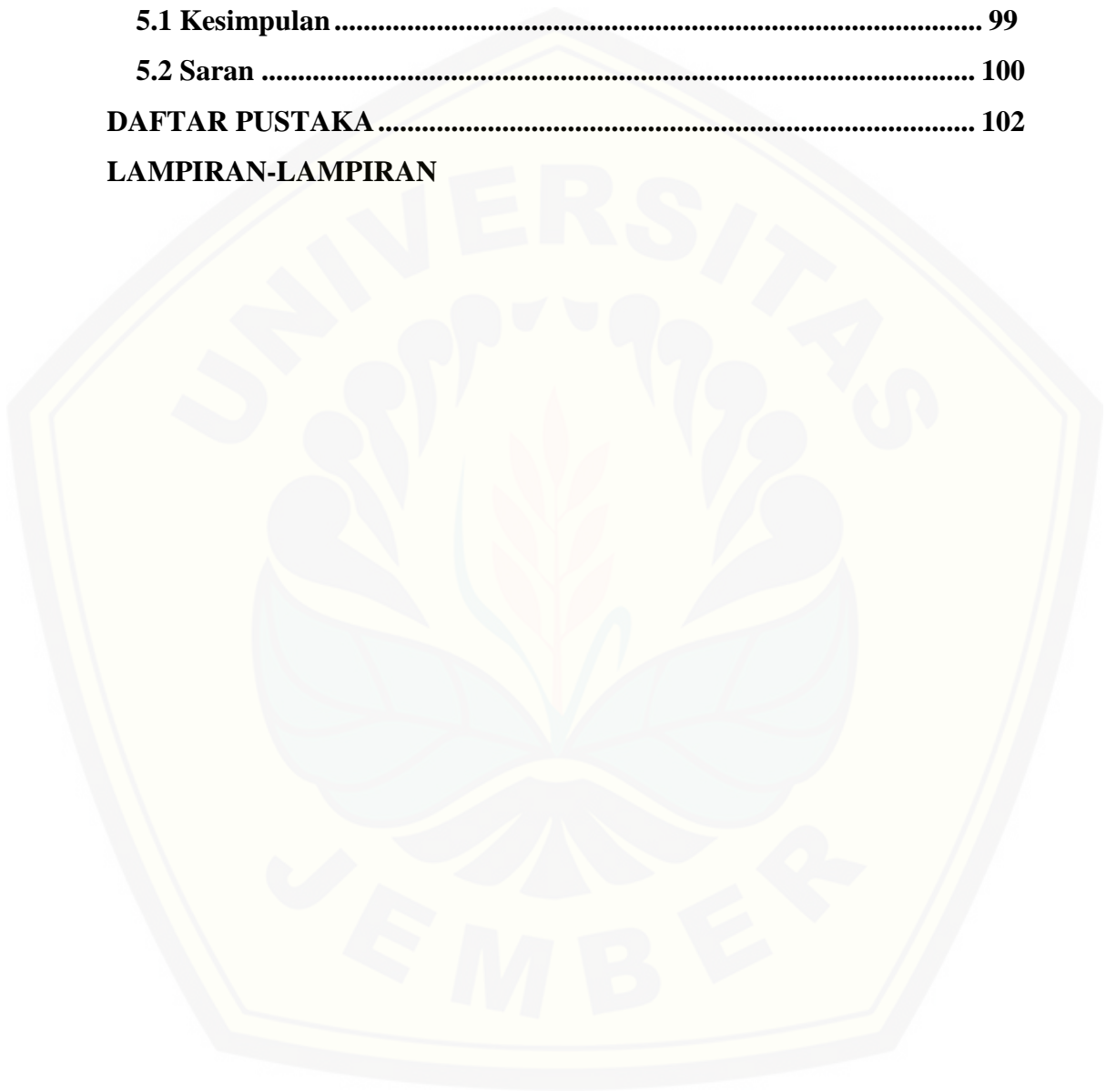
NIM 150910201056

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pelayanan Publik	17
2.1.1 Definisi Pelayanan Publik.....	17
2.1.2 Asas Pelayanan Publik.....	17
2.1.3 Prinsip Pelayanan Publik	18
2.2 Manajemen Pengelolaan	19
2.2.1 Unsur-Unsur Manejemen.....	20
2.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen	21
2.3 Reformasi	23
2.3.1 Definisi Reformasi	23

2.3.2 Reformasi Pelayanan Publik	24
2.4 Pengelolaan Pasar Rakyat/Tradisional.....	25
2.4.1 Pasar Rakyat/Tradisional.....	25
2.4.2 Permasalahan Pasar Rakyat/Tradisional	25
2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pasar Rakyat /Tradisional	26
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Konseptual.....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Desain Penelitian	32
3.3.1 Fokus Penelitian	33
3.3.2 Data dan Sumber Data	33
3.3.3 Penentuan Informan Penelitian	33
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
3.4.1 Observasi.....	35
3.4.2 Wawancara	36
3.4.3 Dokumentasi.....	38
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	40
3.6.1 Reduksi Data	41
3.6.2 Penyajian Data.....	42
3.6.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi	42
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	43
4.1.2 Gambaran Umum Dis KUMP	47
4.1.3 Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi	50
4.2 Penyajian Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Penyajian Data Tentang Pengelolaan Pasar Blambangan.....	53
4.2.2 Penyajian Data Tentang Reformasi Pengelolaan Pasar	61

4.3 Analisis Hasil Penelitian	84
4.3.1 Sistem Pengelolaan Pasar Blambangan	84
4.3.2 Reformasi Sistem Pengelolaan Pasar Blambangan.....	87
BAB 5 PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

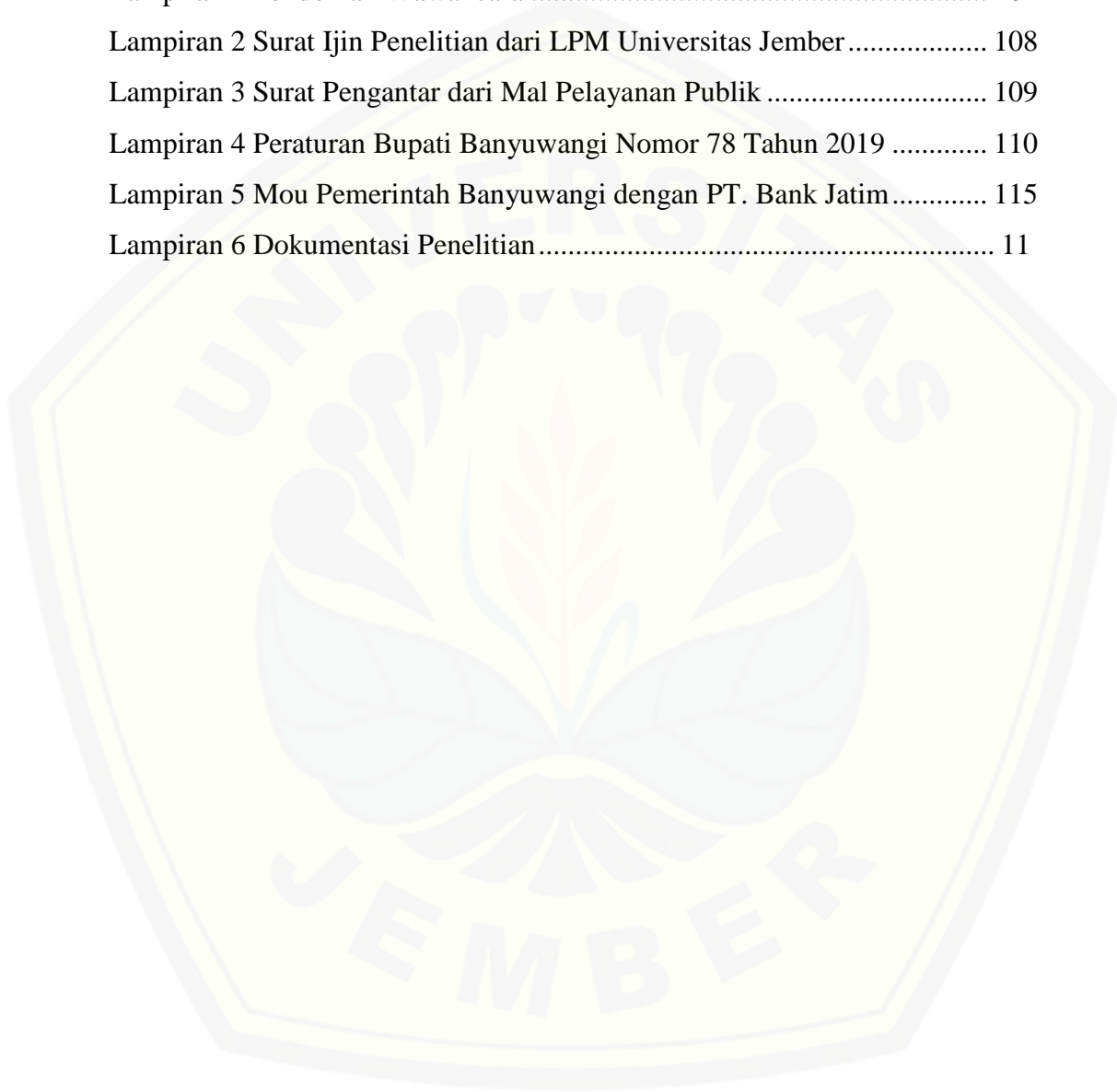
	Halaman
Tabel 1.1 Pasar Rakyat Kabupaten Banyuwangi	3
Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Pasar Blambangan	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Wawancara	37
Tabel 4.1 Jumlah Data Penduduk Kabupaten Banyuwangi	45
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi	46
Tabel 4.3 Jumlah Pedagang di Pasar Blambangan.....	50
Tabel 4.4 Pasar Rakyat di Kabupaten Banyuwangi	54
Tabel 4.5 Rencana Kerja Dis-KUMP Dalam Pengelolaan Pasar.....	62
Tabel 4.6 Jenis dan Harga Lapak di Pasar Blambangan	68
Tabel 4.7 Pembinaan Pasar Rakyat di Kabupaten Banyuwangi	71
Tabel 4.8 Perbandingan Pengelolaan Pasar Sebelum dan Sesudah Reformasi Pengelolaan Pasar.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Presentase Banyaknya Pusat Perdagangan di Indonesia	1
Gambar 1.2 8 Area Perubahan Reformasi.....	8
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	32
Gambar 3.2 Model Analisis Data Miles dan Huberman	41
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dis KUMP.....	49
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kecamatan Banyuwangi	51
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pasar Blambangan.....	52
Gambar 4.5 Kondisi Pasar Blambangan	65
Gambar 4.6 Pembinaan di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.....	75
Gambar 4.7 Kegiatan Kebersihan di Pasar Blambangan	77
Gambar 4.8 Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Juara 1	93
Gambar 4.9 Rapat Koordinasi Evaluasi Dis-KUMP dan Petugas Pasar.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pendoman Wawancara	104
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari LPM Universitas Jember	108
Lampiran 3 Surat Pengantar dari Mal Pelayanan Publik	109
Lampiran 4 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019	110
Lampiran 5 Mou Pemerintah Banyuwangi dengan PT. Bank Jatim	115
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	11

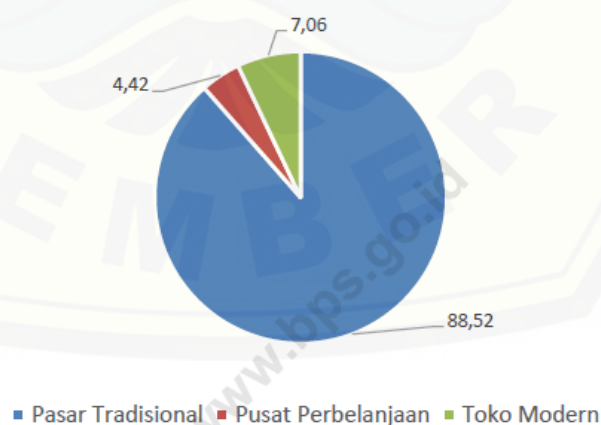


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa reformasi pengelolaan pasar rakyat Blambangan di Kabupaten Banyuwangi. Pasar rakyat merupakan istilah baru untuk menggantikan istilah pasar tradisional sesuai dengan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Pasar rakyat adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Selain itu pasar rakyat merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga aspek penting perekonomian pada suatu daerah. Bahkan pasar tradisional, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan pasar rakyat ini sangat membantu masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena di dalam pasar rakyat terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya.

Gambar 1.1 Presentase Banyaknya Pusat Perdagangan di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil Survei Profil Pasar Tahun 2018, jumlah pasar rakyat di Indonesia dengan jumlah 14.182 pasar atau 88,52 persen dari seluruh pasar di Indonesia. Toko modern jumlahnya juga cukup banyak yaitu sebanyak 1.131 toko atau 7,06 persen dari seluruh pasar di Indonesia. Sedangkan pusat perbelanjaan berjumlah 708 atau 4,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pasar rakyat masih mendominasi jenis pasar di Indonesia. Dominasi banyaknya pasar rakyat tersebut dapat dilihat sebagai gambaran awal bahwa masyarakat masih bergantung pada kearifan budayanya (nilai-nilai budaya dari pasar tradisional).¹

Meskipun begitu, di era modern sekarang eksistensi pasar rakyat semakin berkurang dikarenakan adanya pasar modern dengan pengelolaannya yang cukup baik. Kehadiran peritel modern pada awalnya tidak mengancam pasar tradisional karena kehadiran para peritel modern yang menyerang konsumen dari kalangan menengah keatas, namun sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. *Supermarket* dan *Hypermarket* tumbuh dengan pesatnya. Menurut data yang diperoleh dari Euromonitor tahun 2004, *hypermarket* merupakan peritel dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi (25 persen), koperasi (14,2 persen), *minimarket* (12,5 persen), *independent grocers* (8,5 persen), dan *supermarket* (3,5 persen). Selain mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah dan angka penjualan, peritel modern mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 2,4 persen per tahun terhadap pasar tradisional. Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang.²

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pemerintah berupaya untuk mendorong pasar tradisional/ rakyat agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan perbelanjaan modern dengan dilakukannya pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Pengelolaan pasar rakyat

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), 22 Februari 2019

² Kompas. Senin, 26 September 2011

merupakan hal yang sangat penting, karena dari adanya pasar rakyat ini banyak potensi yang dapat diciptakan yaitu terbukanya lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal.

Sebagaimana di Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan Kabupaten terbesar di Jawa Timur dan mempunyai jumlah pasar rakyat yang cukup banyak, yaitu 21 pasar rakyat yang terbagai di berbagai daerah dengan klasifikasi pasar yang berbeda-beda, yaitu kelas I sebanyak 9 unit, pasar kelas II 4 unit, pasar kelas III 6 unit dan 2 unit pasar Inpres. Pasar Kelas I merupakan jumlah pedagang lebih dari 500 pedagang, Pasar Kelas II yaitu jumlah pedagang kurang dari 400 pedagang dan Pasar Kelas III yaitu jumlah pedagang kurang dari 200 pedagang.³ Lebih jelasnya seperti pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Pasar Rakyat Kabupaten Banyuwangi

No.	Kelas I	Kelas II	Kelas III	INPRES
1	Pasar Banyuwangi	Pasar Glenmore	Pasar Sambirejo	Pasar Pujasera
2	Pasar Blambangan	Pasar Benculuk	Pasar Dam Buntung	Pasar Songgon
3	Pasar Genteng I	Pasar Gendoh	Pasar Jatirejo	
4	Pasar Genteng II	Pasar Kebondalem	Pasar Mojopanggung	
5	Pasar Rogojampi		Pasar Gambiran	
6	Pasar Jajag		Pasar Segitiga Berlian	
7	Pasar Muncar			
8	Pasar Srono			
9	Pasar Kalibaru			

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

³ Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi ini di kelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi (yang dalam penulisan selanjutnya akan disingkat Dis-KUMP) dan dibantu oleh UPT pasar dimasing-masing pasar rakyat. Hal tersebut tertuang pada peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja.

Dari Banyaknya pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi ini menjadikan Dis-KUMP serta kantor UPT pasar lebih ekstra dalam mengelola pasar rakyat. Pengelolaan pasar yang dimaksud adalah dari segi penataan pedagang dan pembinaan pasar, melakukan pemungutan retribusi pasar, melakukan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar. Pasar rakyat yang menjadi lokus peneliti untuk melakukan penelitian adalah pasar Blambangan, yang merupakan pasar terbesar dan mempunyai letak yang strategis di pusat kota Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang di Pasar Blambangan

	Toko	Toko Dalam	Toko Luar	Kios	Los	Lesehan
Blok I		20	23		12	
Blok II		6	8	15	62	
Blok III		12	1	44	12	
Blok IV					78	
Blok A	13			40	6	16
Blok B		4	5		95	
Blok C		1	4		91	11
Blok D		5			130	
Blok E	11				58	
JUMLAH	24	48	41	99	544	27
787 Pedagang						

Sumber: Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

Dengan besarnya pasar dan banyaknya jumlah pedagang, kantor UPT pasar Blambangan mempunyai beberapa permasalahan dalam hal pengelolaan pasar. Masalah pertama, yakni stigma negatif yang selalu melekat pada pasar rakyat, seperti kondisi pasar yang kumuh, kotor, bau dan tidak teratur. Bahkan hampir diseluruh pasar rakyat di Indonesia stigma negatif seperti itu selalu melekat. Dengan kondisi pasar tersebut, pengunjung atau pelanggan merasa kurang nyaman sehingga berpotensi pindahnya pelanggan ke pasar modern yang lebih nyaman dan terjamin kualitas barangnya. Selain itu kondisi pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi yang tidak teratur mengakibatkan arus jalan orang terganggu, dan juga masih banyak pedagang yang menempati lapak lesehan di sembarang tempat, salah satunya di area parkir sehingga masyarakat terpaksa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan umum yang dapat menyebabkan kemacetan kendaraan. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena jumlah pedagang lebih banyak dari pada jumlah lapak jualan untuk pedagang. Bapak Nawari selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan juga mengungkapkan bahwa kondisi keseluruhan pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi kurang terjaga kebersihannya dan kurang tertata pedagangnya (wawancara pada 6/1/2020).

Permasalahan kedua, yakni masih kurangnya sarana prasarana seperti lapak jualan dan tempat pembuangan sampah, selain itu masih adanya preman pasar yang ikut campur dalam pengelolaan pasar yang mengakibatkan kurang berjalan dengan baik retribusi pasar dan tingkat kepedulian pedagang terhadap pasar yang masih kurang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Budi selaku kepala UPT pasar Blambangan pada saat wawancara (15/1/2020).

Permasalahan ketiga, yakni kurang berjalan maksimal pembinaan yang dilakukan oleh Dis-KUMP kepada pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi tidak terkecuali pasar Blambangan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suhernaji selaku Kasi Sarana Prasarana Bidang Pasar bahwa pengelolaan pasar kurang maksimal karena kurang berjalan maksimalnya pembinaan terhadap pedagang (wawancara pada 7/1/2020). Padahal dengan adanya pembinaan untuk pedagang dapat

menambah wawasan, softskil, dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga berdampak positif bagi kualitas dan kuantitas pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan keempat, yakni terkait retribusi pasar yang mengalami berbagai kendala, seperti kurang efektif dan efisien pelayanan retribusi pasar, dikarenakan pelayanan yang masih menggunakan karcis atau manual. Pelayanan retribusi pasar tersebut dirasa memakan banyak waktu untuk mempersiapkan, menghabiskan banyak anggaran, dan rawan terjadi manipulasi. Selain itu kendala retribusi pasar tidak tercapainya target retribusi dikarenakan ada beberapa pedagang yang sulit untuk membayar rutin retribusi pasar, sehingga retribusi pasar kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Suharjo selaku Kasi Pengelolaan pada saat wawancara (10/1/2020), bahwa permasalahan utama retribusi adalah tidak tercapainya target karena kurangnya kesadaran pedagang akan kewajibannya.

Dalam sektor publik, pasar rakyat dapat disebut sebagai pelayanan publik karena merupakan tempat yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain seperti pelayanan dalam hal pengelolaan pasar. Melihat fenomena di atas, faktanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di bidang pasar ini belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Syukri (dalam Handoyo, 2012:174) mencatat bahwa pelayanan publik di Indonesia masih memiliki kelemahan, yaitu kurang koordinasi, kurang aspiratif, sulit diakses, inefisien, dan terlalu birokratis. Itulah sebabnya, perlu ada reorientasi terhadap pelayanan publik yang disediakan. Tentu saja apa yang direorientasikan bukan hanya pada mutu pelayanannya, tetapi juga petugas yang

menyediakan layanan baik berupa barang, jasa maupun pada layanan administratif. Disamping itu, persyaratan, pengawasan, penanganan pengaduan, dan jaminan pelayanan bagi masyarakat perlu dijadikan materi muatan pada pelayanan publik.

Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara sistematis melalui perbaikan kinerja organisasi dan layanan publik masih relatif rendah. Permasalahan utama dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Pelayanan yang berkualitas sangat bergantung pada berbagai aspek, yaitu pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan pada kelembagaan.

Reformasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pemerintah telah menjalankan program [reformasi birokrasi nasional](#) sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui [PERMENPAN](#) No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung

pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.⁴ Berikut adalah 8 area perubahan reformasi.

Gambar 1.2 8 Area Perubahan Reformasi



Sumber: PEMERINTAH.NET

Dengan adanya reformasi diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur pemerintahan semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai langkah nyata reformasi pelayanan publik nampaknya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi giat melakukan upaya-upaya untuk menuju *Good Governance*, melalui pengelolaan pasar rakyat terutama di pasar Blambangan yang dilakukan

⁴ <https://pemerintah.net/area-perubahan-reformasi-birokrasi-2015-2019/>

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dengan dibantu UPT pasar Blambangan. UPT pasar blambangan ini merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di pasar Blambangan. Upaya peningkatan pengelolaan pasar ini sebenarnya sudah tertuang di dalam misi Kabupaten Banyuwangi, yaitu mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.⁵

Keseriusan Pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan pengelolaan pasar rakyat, dilakukan dengan upaya peningkatan fasilitas sarana prasarana pasar, manajemen pengelolaan pasar, sampai kontrol kebersihan pasar kepada para pedagang dan pelayanan retribusi pasar⁶. Perbaikan terhadap sistem pengelolaan pasar tersebut agar sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi agar mampu bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada. Selain itu maksud dari adanya perubahan dan perbaikan dalam hal pengelolaan pasar di pasar blambangan ini agar penyediaan pelayanan dapat memenuhi hak-hak masyarakat, pelayanan yang adil dan merata, pola pikir atau mindset kerja yang profesional dan bertanggung jawab, serta pelayanan yang efektif dan efisien.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan pengelolaan pasar blambangan dilaksanakan pada tahun 2017. Sebelum menjalankan upaya-upaya tersebut Pemerintah Banyuwangi beserta Dis-KUMP dan UPT pasar blambangan mengadakan forum dialog bersama para pedagang pasar Blambangan untuk membahas rencana tersebut. Selain itu adanya forum dialog ini juga dimanfaatkan oleh pihak pengelola untuk menyerap aspirasi dari para pedagang agar pengelolaan selanjutnya tidak terulang permasalahan yang sama. Dihadapan para pedagang, Pemerintah Banyuwangi menegaskan

⁵ RPJMD Kabupaten Banyuwangi (Misi Kabupaten Banyuwangi)

⁶ <http://diskopumkm.banyuwangikab.go.id/page/news/Pemerintah-Serius-Tingkatkan-Pengelolaan-Pasar-se-Banyuwangi> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

pembangunan dan penataan pasar Blambangan baru akan terlaksana jika para pedagang menyetujuinya serta dalam hal ini pemerintah juga menegaskan tidak akan melibatkan investor melainkan murni menggunakan anggaran pemerintah.⁷

Dalam proses ini pengelola pasar banyak melakukan kerjasama dengan berbagai elemen untuk memperlancar proses peningkatan pasar rakyat baik pada saat pra-pembangunan maupun pasca-pembangunan. Salah satunya yaitu untuk tahap pra-pembangunan dibutuhkan seperti sosialisasi, area untuk relokasi pedagang, masalah pembongkaran dan sarana pendukung lainnya. Kebutuhan ini akan dipenuhi oleh beberapa dinas, seperti Dispenda, BPKAD, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Lingkungan Hidup.⁸

Setelah adanya pembangunan di pasar blambangan, tahap demi tahap dilakukan oleh pengelola pasar Blambangan dalam pengelolaan pasar seperti melakukan penataan terhadap pedagang, penyediaan sarana prasarana, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kebersihan dan ketertiban pasar, serta memperbaiki sistem retribusi pasar. Upaya Pemerintah Banyuwangi bersama Dis-KUMP dan UPT pasar ini terlihat dengan selesainya pembangunan di pasar Blambangan selama kurang lebih tiga bulan, tercatat ada 250 los pedagang dengan masing-masing berukuran 2x2 meter telah selesai pembangunannya dan lokasinya berada di pasar Blambangan sebelah Barat. Selain itu pasar blambangan juga menerapkan sistem zonasi pedagang, yaitu pengelompokan para pedagang berdasarkan jenis barang yang dijualnya. Tujuannya agar lebih memudahkan pembeli untuk menemukan barang yang dibutuhkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat, serta agar kondisi di pasar blambangan lebih tertata dan rapi.

Dari segi keamanan dan ketertiban di pasar blambangan cukup baik, dikarenakan ada pihak pengelola pasar bekerja sama dengan satpol pp untuk

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3307349/bupati-anas-ajak-bicara-ratusan-pedagang-bahas-pembangunan-pasar-blambangan> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

⁸ <https://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/pasar-tradisional-banyuwangi-tingkatkan-infrastruktur-demi-kenyamanan-pengunjung-180228t.html> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

membantu menjaga keamanan pasar, dan sudah tidak adanya preman pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Budi selaku Kepala UPT pasar blambangan pada wawancara (15/1/2020), bahwa preman pasar yang dulu meresahkan pedagang dan pembeli sekarang dialih fungsikan ke arah yang lebih baik, salah satunya menjadi ada yang menjadi petugas parkir. Proses tersebut membutuhkan pendekatan dan keberanian yang cukup tinggi, dikarenakan basic dari kepala UPT pasar blambangan adalah mantan petugas satpol pp.

Selain itu pasar Blambangan juga menjadi pasar pertama yang menggunakan sistem pelayanan retribusi secara elektronik atau disebut Elektronik Retribusi Pasar (yang dalam penulisan selanjutnya disingkat *e-rpas*). Program *e-rpas* ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Banyuwangi dengan PT. Bank Jawa Timur (Bank Jatim) untuk memudahkan dalam pelayanan retribusi pasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) Nomor: 188/141/29.012/2018 Tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara non tunai. Program *e-rpas* ini merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menghindari tindakan korup pidana, menjadikan pelayanan lebih efektif efisien, mewujudkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, sekaligus memudahkan pedagang dalam membayar retribusi. Seperti halnya yang dikatakan Bupati Banyuwangi dalam wawancara bahwa “E-retribusi pasar bisa meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat lebih percaya karena uangnya langsung masuk ke system, tidak dibayarkan ke orang per orang. Dulu para pedagang takut dananya bocor karena bayarnya ke orang, akan tetapi sekarang langsung terpantau real time ke system.”⁹

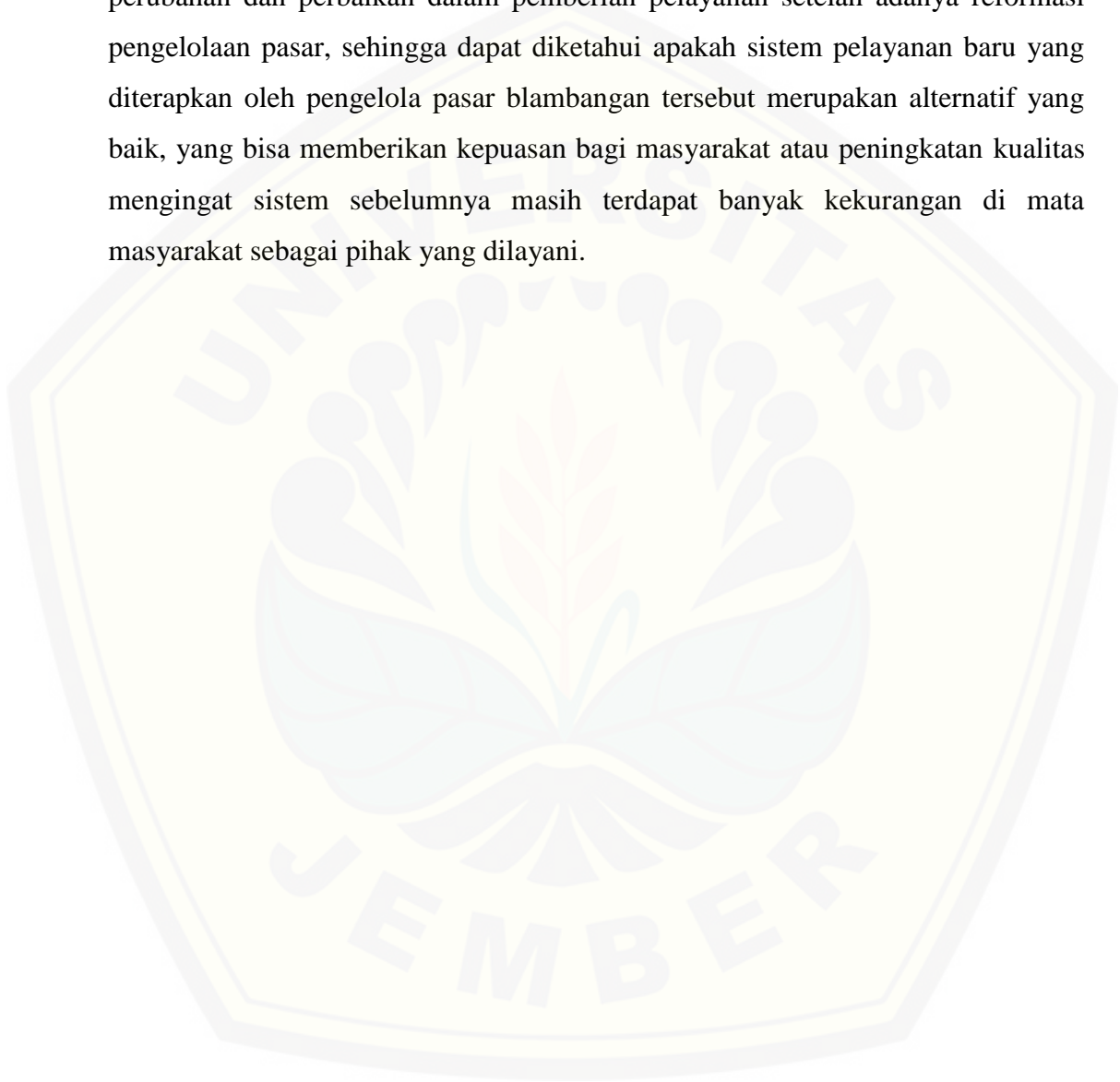
⁹<http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-36699102/pemkab-dan-bni-luncurkan-e-retribusi-di-pasar-banyuwangi> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi beserta pihak pengelola pasar untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat terutama pasar Blambangan cukup terlihat peningkatannya, terbukti dengan diraihinya juara 1 dalam Festival pasar Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi menyelenggarakan festival pasar rakyat ini bertujuan untuk mendorong pengembangan pasar rakyat agar lebih kompetitif, rapi, dan mampu memikat konsumen. Pola pikir/ mindset kerja yang profesional dan bertanggung jawab diterapkan oleh pengelola pasar, seperti rutannya pengawasan atau kontrol terhadap kondisi pasar blambangan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di pasar blambangan, selain itu juga abdi negara lebih dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu untuk mengubah stigma negatif dan menjadikan pasar tampil lebih bersih sehingga nyaman sebagai tempat transaksi belanja. Belasan pasar rakyat se Kabupaten Banyuwangi yang mengikuti festival tersebut membuktikan antusias pasar rakyat untuk berbenah kearah yang lebih baik. Penilaian dilakukan oleh juri independent dilihat dari berbagai aspek, seperti manajemen pengelolaan, kebersihannya, pengelolaan sampah, hingga sarana dan fasilitas yang disediakan pasar tersebut.¹⁰

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan pasar di pasar Blambangan perlahan teratasi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat. Sehingga menjadikan pasar blambangan sebagai pasar percontohan bagi pasar rakyat se-Kabupaten Banyuwangi. Hal ini lah yang menarik peneliti memilih tempat penelitian di pasar blambangan selain pasar terbesar dan berada di pusat kota. Meskipun begitu masih ada beberapa kendala atau hambatan dalam perubahan dan perbaikan pengelolaan pasar, seperti masih kurangnya penyediaan sarana prasarana, masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap pasar, dan belum maksimalnya pelaksanaan sistem e-retribusi pasar.

¹⁰ <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/festival-pasar-tradisional-digelar-di-banyuwangi-berhadiah-sapi-dan-kambing.html> (diakses pada tanggal 27 Februari 2020).

Melihat fenomena yang ada di atas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang reformasi pengelolaan pasar blambangan, setelah sebelumnya pelayanan yang diberikan pemerintah dalam bentuk pengelolaan pasar masih belum berjalan efektif efisien dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Juga dapat melihat perubahan dan perbaikan dalam pemberian pelayanan setelah adanya reformasi pengelolaan pasar, sehingga dapat diketahui apakah sistem pelayanan baru yang diterapkan oleh pengelola pasar blambangan tersebut merupakan alternatif yang baik, yang bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat atau peningkatan kualitas mengingat sistem sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan di mata masyarakat sebagai pihak yang dilayani.



1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Menurut Silalahi (2009:44) masalah merupakan perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Sehingga perlu upaya untuk mencari jawaban akibat rasa keingintahuan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan dari pendapat para ahli tersebut, rumusan masalah yang dibuat peneliti mengacu pada definisi masalah dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap fenomena yang terjadi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan UPT pasar Blambangan sebagai penyelenggara pengelolaan pasar Blambangan. Data hasil observasi peneliti terkait permasalahan dan upaya Pemerintah Banyuwangi menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat dalam mengenai bagaimana reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan ini berjalan. Sehingga perlu adanya penelitian untuk mencari jawabannya.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana reformasi sistem pengelolaan pasar Blambangan di Kabupaten Banyuwangi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam pelaksanaan suatu penelitian. Usman dan Akbar (2009:30) menjelaskan bahwa tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan agar dapat menjawab masalah penelitian, yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai akan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian

terkait. Menurut Wardiyanta (2006:90) manfaat penelitian adalah suatu ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan di lakukan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis bagi kepentingan ilmu pengetahuan

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat mendukung dan menambah kajian tentang reformasi sistem pengelolaan pasar sebagai wujud terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat praktis bagi lembaga pemerintah terkait

Manfaat praktis yang diharapkan bagi lembaga pemerintah yang terkait dengan topik penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bernilai positif bagi pengembangan pengelolaan pasar sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca atau masyarakat luas terkait reformasi sistem pengelolaan pasar. Sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengerti cara dan prosedur dalam memanfaatkan pelayanan yang ada.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian perlu ditegakkan agar suatu penelitian mempunyai dasar yang kokoh yang bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep yang menjadi dasar dalam penelitiannya. Teori menjadi dasar rujukan bagi peneliti untuk menjelaskan berbagai fenomena yang akan diteliti. Menurut Wijaya (2016) teori merupakan sebuah set konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set yang mengandung pandangan sistematis dari sebuah fenomena. Teori terdiri dari konsep-konsep yang saling berkaitan, maka dari itu konsep harus diperjelas karena sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan konsep secara umum. Menurut Silalahi (2009) konsep merupakan sebuah abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik suatu peristiwa atau fenomena sosial tertentu. Konsep dasar menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Dari konsep dasar akan dikembangkan sejumlah konsep teoritis yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam membangun kerangka berfikir untuk menyederhanakan pemikiran dalam mengkaji masalah yang menjadi inti dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep teori yang sesuai dengan kerangka konseptual yang membantu proses penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pelayanan Publik
2. Manajemen Pengelolaan
3. Reformasi
4. Pengelolaan Pasar Rakyat/Tradisional

2.1 Pelayanan Publik

2.1.1 Definisi Pelayanan Publik

Moenir (2002:16) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu proses dalam pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sebagai suatu proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh organisasi dalam masyarakat. Rahmayanty (2013:85) menyatakan bahwa pelayanan publik sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan maupun pelaksana dari ketentuan perundang-undangan. Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2006:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat, sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang berlangsung antar seseorang dengan lainnya yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Asas Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk dapat memuaskan masyarakat. Dalam mencapai kepuasan tersebut, dituntut adanya kualitas pelayanan publik yang professional dengan memperhatikan asas-asas

¹¹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

dalam pelayanan publik sebagaimana dinyatakan oleh Sinambela (2006:6) sebagai berikut.

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
- d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
- e. Keamanan Hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi
- f. Keseimbangan Hak dan kewajiban, yakni pelayanan harus memperhatikan aspek keadilan diantara pemberi dan penerima pelayanan publik serta harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

2.1.3 Prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut.

- a. Kesederhanaan, yakni terkait dengan prosedur pelayanan yang tidak berbelitbelit, mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dilaksanakan
- b. Kejelasan, mencakup kejelasan dalam hal:
 1. persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 2. unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelayanan publik
 3. perincian biaya pelayanan publik serta tata cara pembayaran

- c. Kepastian waktu, yakni pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- d. Akurasi, yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah
- e. Keamanan, yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- f. Tanggung jawab, yakni pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan public
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai serta sarana telematika
- h. Kemudahan akses, yakni tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan bahwa pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam memberikan pelayanan
- j. Kenyamanan, yakni lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tungguyang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

2.2 Manajemen Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Manajemen

Menurut Brantas (2009:4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola. Dalam bahasa inggris manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang dalam bahasa indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina dan memimpin.

Hasibuan mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry dalam Hasibuan (2009:2) mengatakan “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”. Artinya, Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Terry dalam Amirullah dan Budiyono (2004:7), “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”. Artinya, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

2.2.2 Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting. Manajemen tidak saja mengidentifikasi, menganalisis dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut dinyatakan enam M dari manajemen, yaitu:

1. Men, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun tenaga kerja kooperatif;
2. Money, uang atau modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Methods, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan;

4. Materials, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan;
5. Machines, mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan;
6. Markets, pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan.

Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha, serta biaya yang ditetapkan. (Brantas, 2009:13)

2.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan berada dalam proses manajemen yang menjadi patokan bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Terry antara lain: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut terdapat definisi dari para ahli seperti:

1. Perencanaan (*Planning*)

Terry dalam Hasibuan (2009:92) mengatakan, "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results*". Artinya, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Terry dalam Hasibuan (2009:119) mengatakan, "*Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among*

persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective". Artinya, Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah kegiatan untuk menggerakkan atau mengarahkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang di inginkan. Terry dalam Hasibuan (2009:183) mengatakan, "*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*". Artinya, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian sangat berperan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi, dimana pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang akan dicapai. Terry dalam Hasibuan (2009:242) mengatakan, "*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard*". Artinya, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,

menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

2.3 Reformasi

2.3.1 Definisi Reformasi

Reformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu re form “mem-perbaiki” yang berarti perubahan suatu sistem yang sudah ada pada suatu masa”. Kata-kata reformasi dalam pemerintahan yang dapat diartikan perubahan/perbaikan suatu sistem dalam pemerintahan, Dilakukannya reformasi dalam suatu sistem jika dianggap sistem yang digunakan itu sudah tidak efisien lagi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Sedarmayanti (2009: 67) reformasi merupakan “proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good governance). Good governance adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat”. Kemudian, menurut Samonte dalam (Ismiyarto, 2016: 4) memberikan pemahaman tentang reformasi “sebagai perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dengan penggunaan perencanaan dan adopsi untuk untuk membuat sistem administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial, sebagai instrument yang baik untuk membawa persamaan politik, sosial, dan perubahan ekonomi”. Selanjutnya menurut Sinambela dkk, (2014: 25) menyatakan bahwa: Secara teoretis, reformasi adalah perubahan di mana ke dalamannya terbatas sedangkan keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Pengertian ini akan lebih jelas jika dibedakan dengan revolusi. Konsep terakhir menunjukkan ke dalamannya perubahannya radikal sedangkan keluasan perubahannya melibatkan pula seluruh masyarakat. Sebagai perubahan yang terbatas tetapi seluruh masyarakat masyarakat terlibat, reformasi juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami

bahwa reformasi merupakan suatu upaya perubahan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih efektif dengan melibatkan seluruh masyarakat.

2.3.2 Reformasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Namun, dalam perjalanannya ternyata pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan yang menghadang. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat. Sedangkan telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dimana rakyat atau warga Negara adalah fokus dari pelayanan.

Oleh karena itu reformasi kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan publik, harus dilakukan secara menyeluruh, agar tidak terfragmentasi secara sektoral dan tanpa koherensi yang logis, serta terselenggara bersesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masyarakat Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Dengan kata lain reformasi ini akan sejalan dengan reformasi pelayanan publik, karena setiap penyelenggaraan negara sebenarnya akan bermuara pada pemberian pelayanan publik. Pada dasarnya reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi.

2.4 Pengelolaan Pasar Rakyat/ Tradisional

2.4.1 Pasar Rakyat/ Tradisional

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat (Sutiyanto, 2008).

2.4.2 Permasalahan Pasar Rakyat/ Tradisional

Hal-hal yang bermasalah pada pasar tradisional (Sutiyanto, 2008) umumnya adalah :

1. Pasar tradisional merupakan infrastruktur ekonomi daerah, menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran.
2. Keberadaannya kian menurun dengan berkembangnya pasar-pasar swasta modern khususnya diperkotaan. Serbuan pasar modern dengan dukungan kekuatan modal besar, sistem dan teknologi modern, berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.
3. Image pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman, dan fasilitas umum seperti parkir, toilet, tidak ada tempat pengelolaan sampah, fisik kurang terawat.
4. Pasar tradisional kurang mampu berkompetisi dengan perpasaran swasta.
5. Pasar tradisional lemah dalam manajemen dan kurang mengantisipasi perubahan. Pada dasarnya permasalahan klasik pasar tradisional adalah kondisi pasar yang terlihat kumuh dan lemah dalam manajemen pengelolaannya, jika hal itu dibiarkan dan tidak segera ditanggapi oleh pihak

pengelola pasar, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan hilang dari peredaran di masyarakat dan posisinya tergantikan oleh pasar-pasar modern yang ada karena tidak mampunya dalam berkompetisi.

Masalah lain adalah ketidakmampuan pengelolaan pasar tradisional dalam menciptakan pasar yang bersih dan aman serta tidak ada usaha untuk melakukan pembinaan kepada parapedagang untuk berpraktek dagang yang sehat dan jujur, hal ini menyebabkan konsumen enggan berbelanja dipasar tradisional. Selain itu pasar yang becek, berbau tidak sedap, kerawanan keamanan, dan praktek dagang yang tidak sehat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan konsumen sehingga mereka lebih baik meninggalkan pasar tradisional karena mempunyai resiko yang tinggi (Zumrotin, 2002).

2.4.3 Prinsip- Prinsip Pengelolaan Pasar Rakyat/ Tradisional

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar di antaranya :

a. Otonomi Pengelolaan Pasar

Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk dapat mengatur semua urusan yang menjadi kewajiban pemerintah itu sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.

b. Sistem Pengelolaan yang terintegrasi

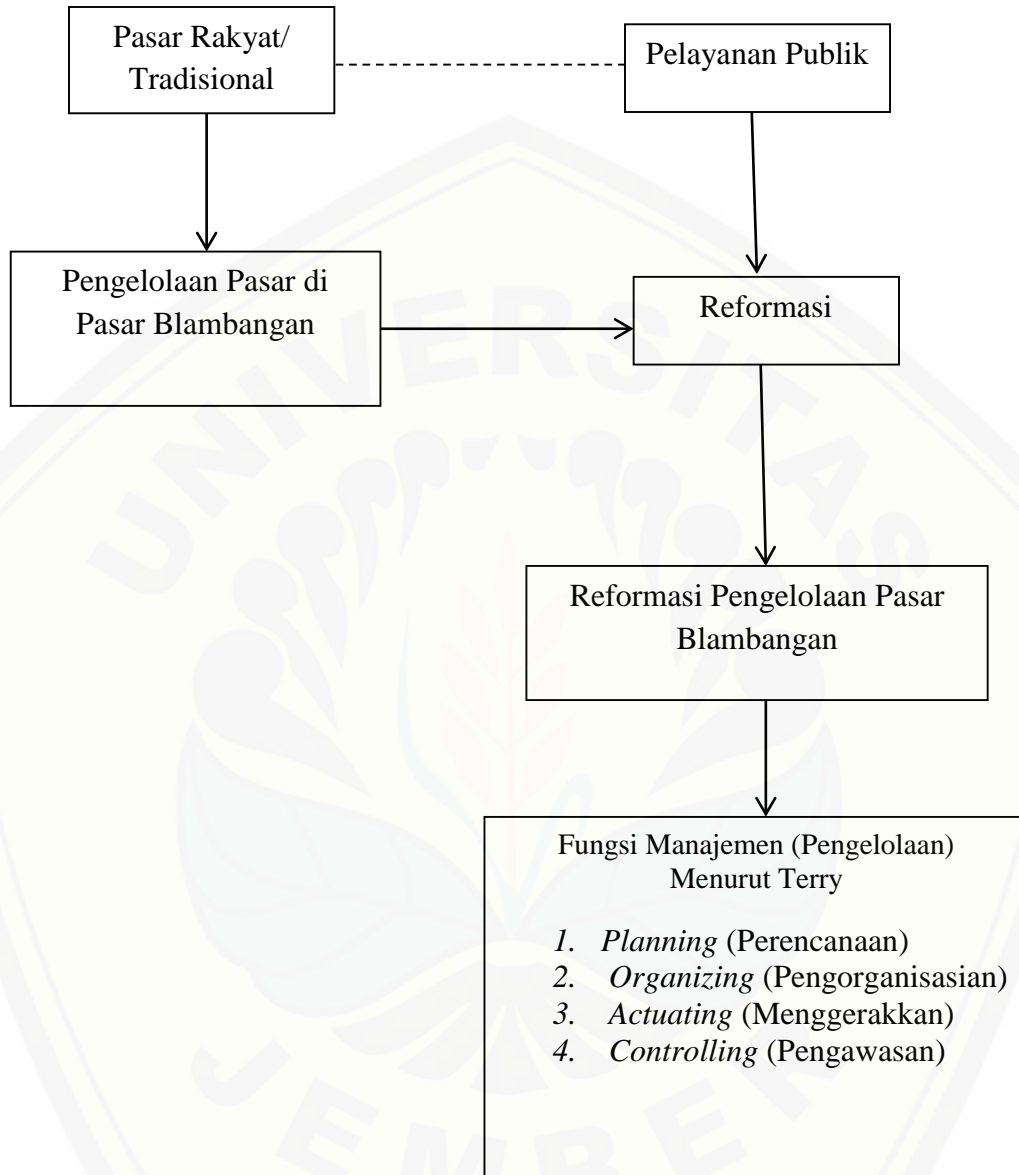
Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan sebuah pasar yang baik. Pasar haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi dalam satu sistem. Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen yang profesional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola pasar harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan. Dari segi pengelolaan parkir itu sendiri sumber daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan, Pengelolaan kebersihan dalam rangka perwujudan pasar yang bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembiayaan operasional kebersihan. Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme manajemen pasar.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak
Tahun	2017
Penulis	Evi Rivitasari
Lembaga	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Rumusan masalah	1. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak?
Metode penelitian	Kualitatif Deskriptif
Hasil penelitian	Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Lebak masih belum maksimal, karena kondisi pasar yang kotor, pedagang tidak teratur, kurangnya sarana prasarana, kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi pasar. Dengan hal tersebut peluang yang dimiliki pasar di Kabupaten Lebak yaitu adanya rencana revitalisasi pasar.
Persamaan dengan peneliti	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif Membahas tentang pengelolaan pasar tradisional secara umum
Perbedaan dengan peneliti	<ol style="list-style-type: none"> Tempat dan waktu penelitian Membahas tentang pengelolaan pasar tanpa menggunakan perspektif teori lain untuk menilai

2.6 Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengelola data dalam rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Menurut Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:41) metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan menurut Silalahi (2012:6) mengatakan bahwa metode ilmiah adalah sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Berdasarkan dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan serta hasil dari penelitian sangat bergantung dari metode yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa komponen yang digunakan dalam penelitian dalam metode penelitian menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Jenis Penelitian
- b. Tempat dan Waktu Penelitian
- c. Desain Penelitian
- d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
- e. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
- f. Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah cara atau metode yang digunakan peneliti dalam menentukan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara

holistik (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Silalahi (2009) mendefinisikan penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan kaidah hubungan antar-peristiwa, baik yang menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-stimasi-proyeksi tentang gejala yang muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa.

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji fenomena secara mendalam dengan upaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengupayakan tergambarnya secara jelas tentang proses reformasi sistem pengelolaan pasar Blambangan di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi faktor penting dalam penentuannya karena akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tempat dan waktu penelitian adalah mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian, diantaranya yaitu:

1. Belum ada penelitian di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi mengenai reformasi sistem pengelolaan pasar.
2. Pasar Blambangan merupakan pasar percontohan bagi pasar-pasar rakyat di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

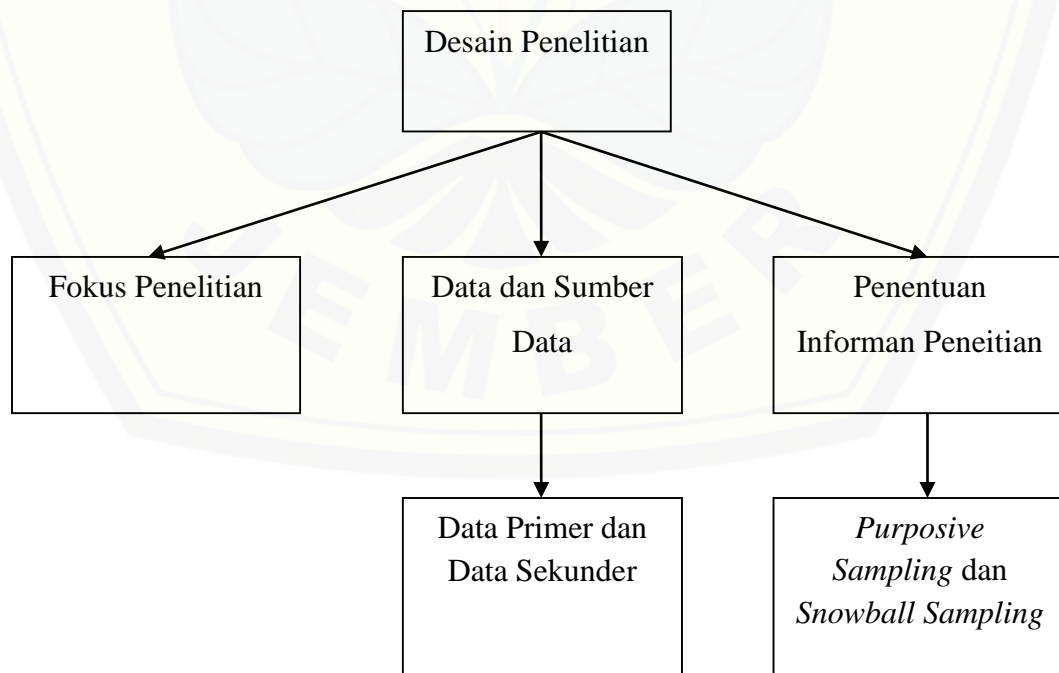
Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Januari hingga Maret tahun 2020, yaitu sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember. Rentang waktu tersebut diharapkan peneliti dapat

mengetahui dan mengenali terkait fenomena yang menjadi fokus peneliti, yaitu tentang reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan di Kabupaten Banyuwang.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan salah satu bagian yang penting karena diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian menurut Silalahi (2009: 180) adalah suatu rencana dan struktur penyelidikan yang disusun secara sistematis sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Penelitian kali ini termasuk dalam penelitian deskriptif jika dan Arikunti dalam Prastowo (2012:111) mengatakan bahwa metode peneliiian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menggambarkan bentuk desain peneitian dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain Penelitian



Sumber : diolah peneliti (2020)

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan media sebagai sarana memusatkan dan mengarahkan penelitian agar tidak keluar dari objek yang hendak diteliti, sehingga sasaran penelitian dapat tercapai. Fokus penelitian juga membatasi objek yang diteliti sehingga tidak meluas dari objek yang hendak diteliti. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana proses reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan di Kabupaten Banyuwangi.

3.3.2 Data dan Sumber Data

Adapun sumber data kualitatif didapatkan dari sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang dinyatakan oleh Silalahi (2009) adalah sebagai berikut.

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui pelaku (tangan pertama). Sumber data yang diperoleh pada penelitian kali ini adalah melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait fokus penelitian reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui tangan kedua. Sumber data yang diperoleh dalam hal ini yang dimaksud adalah bersumber dari hasil studi literatur dan dokumentasi terkait penelitian.

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Peneliti harus tepat sasaran dalam menentukan seorang informan yang nantinya akan memberikan informasi. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati;
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti;
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu mengendalikan sifat subyektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Sedangkan metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sugiyono (2014) mendefinisikan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti memilih beberapa orang yang memenuhi kriteria sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait reformasi sistem pengelolaan pasar blambangan di Kabupaten Banyuwangi. Informan yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut.

1. Nawari, S.Sos selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
2. Ir. Suhernaji selaku Seksi Sarana Prasarana Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
3. Suharjo selaku Seksi Pengelolaan Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
4. Budi Harianto selaku Koordinator Pasar Blambangan
5. Irawati selaku Administrasi Bendahara Pembantu Pasar Blambangan
6. Samsul Hadi selaku Bendahara Pembantu
7. Solikin selaku Petugas Juru Pungut
8. Kirana selaku pegawai Bank Jatim

9. Ibu Siti Pedagang Pasar Blambangan
10. Ibu Nur Pedagang Pasar Blambangan
11. Ibu Is Pembeli di Pasar Blambangan

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu terkait dengan cara-cara yang akan digunakan oleh peneliti sebagai upaya pengumpulan data dan mendapatkan data dengan standart ilmiah. Menurut Sudaryono (2018) metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strateri atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya, dan juga teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.

Alat perolehan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Menurut Sudaryono (2018) observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, dan observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi. Observasi partisipasi (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan, sedangkan observasi nonpartisipasi (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak ikut dalam kegiatan. Jenis observasi dalam teknik pengumpulan data yang

digunakan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipasi (*nonparticipatory observation*) dalam menyelesaikan masalah penelitian.

3.4.2 Wawancara

Menurut Moleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara merupakan sumber data atau informan yang memberi jawaban atas pertanyaan peneliti.

Esterberg dalam Sugiyono (2014) membagi teknik wawancara menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut. Wawancara merupakan salah satu tahapan dari kegiatan penelitian tersebut.

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Teknik wawancara ini, peneliti telah mengetahui permasalahan dalam objek penelitian, sehingga dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau yang disebut pedoman wawancara.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.

3. Wawancara tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistemis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara jenis ini

biasa dilakukan dalam penelitian pendahuluan yang tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi terkait permasalahan dalam objek penelitian.

Peneliti dalam hal ini adalah sebagai pewawancara dan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, petugas Pasar, Pedagang, serta pembeli di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur agar kegiatan tidak terlihat kaku dan mengalir dalam mencari informasi. Proses wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, serta kantor UPT pasar Blambangan, dengan menggunakan alat bantu untuk menunjang proses wawancara adalah *draft* wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara. Berikut ini adalah rincian daftar kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Wawancara Penelitian

No	Informan	Waktu	Tempat
1	Bapak Nawari (Ketua Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	20 Agustus 2019 dan 6 Januari 2020	Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan
2	Bapak Suhernaji (Kasi Sarana Prasarana Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	7 Januari 2020	Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan
3	Bapak Suharjo (Kasi Pengelolaan Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	10 Januari 2020	Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan
4	Bapak Budi Harianto (Koordinator Pasar Blambangan)	15 dan 28 Januari 2020	Kantor UPT Pasar Blambangan
5	Bapak Samsul Hadi (Bendahara Pembantu Pasar Blambangan)	3 Februari 2020	Kantor UPT Pasar Blambangan
6	Ibu Irawati (Bendahara Pembantu Pasar Blambangan)	3 Februari 2020	Kantor UPT Pasar Blambangan
7	Bapak Solikin (Juru Pungut Pasar Blambangan)	5 Februari 2020	Pasar Blambangan
8	Ibu Kirana (Juru pungut dari	10 Februari 2020	Pasar Blambangan

	Bank Jatim di Pasar Blambangan)		
9	Ibu Siti (Pedagang di Pasar Blambangan)	5 Februari 2020	Pasar Blambangan
10	Ibu Nur (Pedagang di Pasar Blambangan)	10 Februari 2020	Pasar Blambangan
11	Ibu Is (Pembeli di Pasar Blambangan)	10 Februari 2020	Pasar Blambangan

3.4.3 Dokumentasi

Pengertian dokumentasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Usman dan Akbar (2009) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian dokumen digunakan sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sebagai berikut.

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong
- b. Dokumen sebagai bukti dalam penelitian
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi.

1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
2. Daftar pasar rakyat Kabupaten Banyuwangi
3. Materi pembinaan untuk setiap pasar se-Kabupaten Banyuwangi
4. MoU program E-Retribusi Pasar
5. Data jumlah seluruh pedagang di pasar Blambangan
6. Struktur Organisasi UPT Pasar blambangan.
7. Sarana Prasarana Pasar Blambangan

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data adalah tahapan yang sangat penting dilakukan karena kaitannya dengan relevansi suatu penelitian. Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Meleong (2013: 320) pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah baik terhadap yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Meleong (2014: 332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Seperti yang dikatakan Meleong (2014:332) triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara sebagai berikut :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

Menguji akredibilitas sebuah data dapat dilakukan dengan memilih jenis-jenis triangulasi yang ada. Sugiyono (2018:257) mengatakan bahwa terdapat 3 triangulasi diantaranya yaitu :

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh wawancara, kemudian dicek kembali dengan observasi.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu uji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan pada wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data yang diperoleh atau diterima tidak ada perbedaan dan valid. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

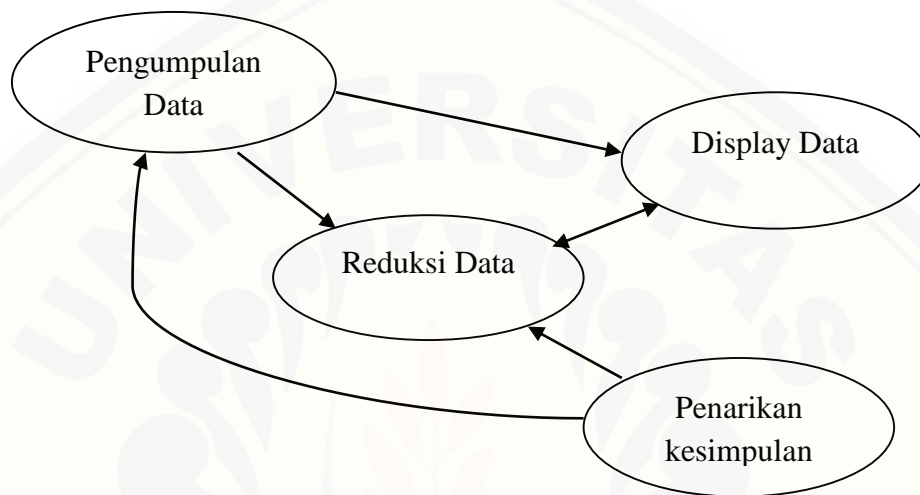
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2017:239) merupakan proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Peneliti menggunakan analisis data model Miles

dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini gambar skema analisis data dan penjelasan lebih lanjut model analisis data Miles dan Huberman

Gambar3.2 Skema Analisis Data dan Penjelasan Lebih Lanjut Model Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono (2009:338)

1. Reduksi Data

Sugiyono (2009:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Selama masa pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan kategori masing-masing agar lebih rinci dan mudah diolah. Peneliti memilih data-data yang berkaitan dengan reformasi sistem pengelolaan pasar Blambangan di Kabupaten Banyuwangi.

2. Penyajian Data

Sugiyono (2009:341) menjelaskan bahwa dalam melakukan display data dapat disajikan dalam bentuk narasi wawancara, tabel, dan gambar. Melalui penyajian data, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar maka akan memudahkan memahami atas segala hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data tersebut terletak pada Bab 4 yaitu mengenai Hasil dan Pembahasan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan sering disebut juga tahap verifikasi. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan merupakan hasil terakhir dalam penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian kali ini tepatnya yang dijelaskan di Bab 5 Penutup.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan penyajian analisis atas data yang telah terkumpul dapat disimpulkan bahwa, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serius untuk meningkatkan pengelolaan pasar dengan cara mereformasi sistem pengelolaan pasar terutama di pasar blambangan. Hal tersebut dilakukan karena pengelolaan pasar yang dulu belum berjalan maksimal dan mengalami berbagai permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pasar tersebut, aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau reformasi yaitu dari segi pelayanan publik, sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, pola pikir dan budaya kerja yang profesional.

Adanya perbaikan atau reformasi sistem pengelolaan pasar di pasar blambangan ke arah yang lebih baik tersebut ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen menurut Terry, yaitu pertama dari segi perencanaan (*planning*), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menyusun rencana kerja untuk meningkatkan pengelolaan pasar, yang terdiri dari perbaikan pembangunan dan penataan pasar, penyediaan sarana prasarana, pembinaan pedagang, dan pelayanan retribusi pasar berbasis elektronik. Kedua dari segi pengorganisasian (*organizing*), tidak adanya pembagian kerja yang tumpang tindih karena tugas pokok dan fungsi setiap bidang sudah tertera di Peraturan Bupati, baik dari kepala bidang pasar, seksi pengelolaan pasar, seksi sarana dan prasarana pasar, sampai kantor upt pasar. Ketiga dari segi menggerakkan (*actuating*), pola komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sampai pada kantor UPT pasar blambangan terjalin dengan baik. Hal tersebut membawa pengaruh positif ke mindset atau budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Bukan hanya untuk para pengelola pasar, tetapi berlaku untuk para pedagang yang semakin peduli akan kondisi pasar blambangan. Keempat dari segi controlling (*pengawasan*) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta dibantu oleh kantor UPT pasar blambangan

sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola dilakukan secara rutin, bukan hanya petugas pasar yang selalu memantau kondisi pasar blambangan, namun pihak dinas juga melakukan pengawasan dilapangan baik itu pada waktu hari kerja ataupun hari libur. Hal itu dilakukan pihak pengelola pasar sebagai bentuk profesionalitas kerja, agar kondisi pasar termasuk pasar blambangan selalu kondusif dan teratur. Meskipun keseluruhan pengelolaan pasar blambangan berjalan dengan baik, tetapi masih ada sedikit kendala yang dialami oleh pihak pengelola pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran mengenai reformasi pengelolaan pasar di pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi. Adapun beberapa saran yang peneliti berikan yaitu sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta kantor UPT pasar blambangan untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kondisi pasar blambangan kepada para masyarakat agar lebih aman dan nyaman untuk dikunjungi. Sampaikan pemahaman tersebut melalui rapat koordinasi bersama pedagang ataupun secara individu, agar lebih terjalin komunikasi yang baik antar pedagang dan pengelola pasar Blambangan.
2. Perlu adanya kegiatan rutin seperti lomba atau kegiatan lain antara pengelola pasar dengan para pedagang pasar blambangan guna untuk meningkatkan kekompakan, gotong royong dan kepedulian terhadap sekitarr.
3. Diharapkan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai pengelola pasar Rakyat di Banyuwangi termasuk juga pasar Blambangan, bukan hanya rutin mengawasi setiap pasar rakyat melainkan juga memahami kekurangan dari pasar rakyat.
4. Selain itu juga perlu ditingkatkan sosialisai terkait inovasi Elektronik Retrbusi Pasar agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan ini dapat diselenggarakan secara maksimal. Karena masih banyak pedagang

yang tidak tahu kejelasan patokan mengenai besaran pokok yang akan dibayarkan kepada petugas juru pungut retribusi pasar. Hal tersebut diharapkan penerapan *e-Government* dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar bahwa proses transaksi dapat dikatakan transparansi dan akuntabel dan diharapkan akan berjalan 100% atas keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdullah, Thamrin. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Creswell. J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dadang Juliantara. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Gulo. W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismiyarto, 2016. *Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Publik (Teori, Kebijakan, dan Aplikasinya)*. Bandung, Alfabeta
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Moenir, H.A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rahmayanty, Nina. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung. Refika Aditama
- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial Cetakan ke-1*. Bandung: PT Refika Aditama
- Silalahi. U. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sinambela, L. P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta
- Sutiyanto. 2008. *Masa Depan Pasar Tradisional*. Bahan Presentasi CPMUUSDRP Dirjen Cipta Karya
- Terry, George. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Usman, H dan P.S Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI
- Wijaya, Hengky. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Zumrotin KS. 2002. *Pola Keterkaitan Pasar Modern Dengan Pasar Swalayan*. Diklat Manajemen Pasar Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

MoU (*Memorendum of Understanding*) Nomor: 188/141/29.012/2018 Tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara non tunai

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Jurnal/Skripsi

Rivitasari, Evi. 2017. Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Ilmu Administrasi Negara

Internet

<http://diskopumkm.banyuwangikab.go.id/page/news/Pemerintah-Serius-Tingkatkan-Pengelolaan-Pasar-se-Banyuwangi> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/anas-ingin-pasar-di-banyuwangi-seperti-pasar-wisata-di-thailand.html> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<https://news.detik.com/berita/d-3307349/bupati-anas-ajak-bicara-ratusan-pedagang-bahas-pembangunan-pasar-blambangan> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<https://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/pasar-tradisional-banyuwangi-tingkatkan-infrastruktur-demi-kenyamanan-pengunjung-180228t.html> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-36699102/pemkab-dan-bni-luncurkan-e-retribusi-di-pasar-banyuwangi> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/festival-pasar-tradisional-digelar-di-banyuwangi-berhadiah-sapi-dan-kambing.html> (diakses pada tanggal 27 Februari 2020)

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pertanyaan kepada pegawai bidang pasar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi?**

1. Bagaimana kondisi pasar rakyat dulu dan pengelolaannya seperti apa?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pengelolaan pasar rakyat?
3. Bagaimana mekanisme penggunaan lapak oleh pedagang?
4. Peraturan/sanksi seperti apa yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan apabila pedagang melanggar peraturan?
5. Bagaimana kondisi pasar rakyat sekarang?
6. Apa yang mengakibatkan adanya perbuahan sistem pengelolaan pasar rakyat?
7. bagaimana perencanaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam mengelola pasar rakyat di Kabupaten Banyuwangi?
8. Seperti apa sistem penataan kios atau los pedagang?
9. Langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk meningkatkan kualitas pedagang?
10. Langkah apa yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam menjaga keamanan pasar rakyat?
11. Langkah apa yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam menjaga ketertiban di pasar rakyat?
12. Langkah apa yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam menjaga kebersihan di pasar rakyat?
13. Adakah instansi atau lembaga yang membantu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam mengelola pasar rakyat?

B. Pertanyaan kepada pegawai Petugas UPT pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi?

1. Seperti apa kondisi pasar blambangan dulu dan pengelolaannya seperti apa?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pengelolaan pasar blambangan dulu?
3. Seperti apa sistem penggunaan lapak oleh pedagang?
4. Peraturan /sanksi apa saja yang diterapkan kepada pedagang apabila melanggar?
5. Seperti apa kondisi pasar blambangan sekarang dan pengelolaannya seperti apa?
6. Apa yang mengakibatkan adanya perubahan sistem pengelolaan pasar blambangan?
7. Seperti apa penataan kios dan los pedagang di pasar blambangan?
8. Langkah seperti apa yang dilakukan dalam menjaga ketertiban pedagang pasar?
9. Langkah seperti apa yang dilakukan dalam menjaga keamanan atau keterjaminan pedagang agar pedagang merasa nyaman saat berjualan?
10. Langkah seperti apa yang dilakukan dalam menjaga kebersihan pasar blambangan?
11. Seperti apa sistem penggunaan lapak oleh pedagang sekarang?
12. Bagaimana arus pendistribusian orang dan barang di pasar tradisional?
13. Apakah ada perubahan pembagian kerja pada petugas pasar?
14. Berapa jumlah kios atau los pedagang yang ada di pasar blambangan?
15. Fasilitas apa yang kurang di pasar blambangan?
16. Apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh petugas pasar dalam menjalankan pengelolaan pasar?

17. Langkah seperti apa yang dilakukan dalam menertibkan pedagang yang nakal terhadap pedagang lain?
18. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan para petugas pasar untuk pengelolaan pasar?
19. Apakah ada pembinaan terhadap pedagang?
20. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di pasar blambangan?
21. Apa dasar penetapan target retribusi pasar di pasar blambangan?
22. Bagaimana pengawasan rertribusi pasar yang diterapkan oleh petugas pasar?
23. Apa saja kendala dan hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar?


C. Pertanyaan kepada pedagang di pasar blambangan Kabupaten Banyuwangi?

1. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap pengelolaan keamanan pasar?
2. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap pengelolaan ketertiban pasar?
3. Langkah apa yang dilakukan dalam menjaga kebersihan pasar blambangan?
4. Bagaimana arus pendistribusian barang di pasar blambangan?
5. Apakah fasilitas di pasar blambangan menurut bapak/ibu sudah mencukupi kebutuhan pedagang?
6. Bagaimana tanggapan pedagang apabila ada pedagang yang nakal terhadap pedagang lain?
7. Apakah pedagang merasa nyaman terhadap pengelolaan yang diberikan oleh petugas pasar?
8. Bagaimana sistem pemungutan retribusi pasar di pasar blambangan?
9. Apakah sesuai tarif retribusi pasar dengan fasilitas yang diberikan oleh pengelola pasar?

10. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pengelola pasar apabila ada pedagang yang melanggar?
11. Apakah ada pembinaan khusus terhadap pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar?
12. Apakah di pasar blambangan mempunyai kelompok atau paguyuban pasar?



Lampiran 2 Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jember



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 57 /UN25.3.1/LT/2020 3 Januari 2020
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian


Yth. Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi
Di
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 5188/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Ijin Penelitian,


Nama : Mochammad Rifqi Riva
NIM : 150910201056
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Dsn. Cangaan Genteng Wetan RT/RW 05/07 Genteng-Banyuwangi
Judul Penelitian : "Reformasi Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi
2. Pasar Blambangan Kab. Banyuwangi
Lama Penelitian : Bulan Januari-Maret 2020

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.
1. Kepala Disperindag Kab. Banyuwangi;
2. Kepala Pasar Blambangan;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs;
5. Arsip.


 CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 3 Surat Pengantar dari Mal Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jendral Ahmad Yani No 57 Banyuwangi 68416
 Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343
 email : dprmtsp@banyuwangikab.go.id website : www.dprmtspbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 15 Januari 2020
Kepada :

Nomor : 072/ 25 /REKOM/429.111/2020 Yth. Sdr 1. Kepala Dinas
Sifat : Biasa Perindustrian dan
Lampiran : - Perdagangan
Perihal : Surat Pengantar 2. Kepala Pasar Blambangan
Penelitian/Survey/Research Kab. Banyuwangi
di
BANYUWANGI

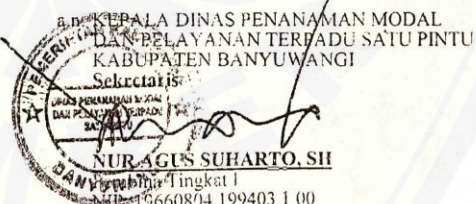
Menunjuk Surat : Sekretaris II Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember
Tanggal : 3 Januari 2020
Nomor : 57/UN25.3.1/L.1/2020

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :
 Nama : Mochammad Rifqi Riva
 NIM : 150910201056
 Prodi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:
 Judul : Reformasi Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional Blambangan Kabupaten Banyuwangi
 Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi
 Waktu : Januari s/d Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.


 Sekretaris
NUR AGUS SUHARTO, SH
 Tingkat I
 NIP. 19660804 199403 1 00

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

22

- l. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pada Seksi Metrologi Legal;
- m. melaksanakan pelayanan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Metrologi Legal;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Bagian Kelima

Bidang Pasar

Pasal 14

- (1) Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pasar;
 - b. penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang pasar;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang pasar;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pasar sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pasar;
 - c. menyusun petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pasar;
 - d. mengoordinasi pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan pasar rakyat termasuk penataan dan pembinaan kelompok pedagang pasar;

23

- e. melaksanakan penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat;
- f. menerbitkan rekomendasi perizinan penempatan / sewa menyewa atas bangunan pasar serta pengaturan penempatan pedagang dalam pasar rakyat;
- g. melakukan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi pasar rakyat;
- h. melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar rakyat;
- i. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program Bidang Pasar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program Bidang Pasar;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar rakyat;
 - c. melaksanakan pengelolaan pasar rakyat termasuk membantu proses perizinan penempatan /sewa menyewa atas bangunan dalam pasar dan melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

24

- d. melaksanakan pembukuan, penyeteroran dan pelaporan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya dari hasil pengelolaan pasar rakyat;
 - e. mengadakan pengawasan keamanan pasar rakyat dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - f. melakukan tindakan penyevelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - g. menyusun pedoman teknis dan melaksanakan penguatan kelembagaan kelompok pedagang pasar rakyat;
 - h. menyusun pedoman teknis dan melaksanakan penataan dan pembinaan pengelola dan kelompok pedagang pasar terkait manajemen usaha, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - i. melaksanakan pendataan dan menyusun profil pasar rakyat;
 - j. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pasar sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - c. melaksanakan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;

25

- f. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

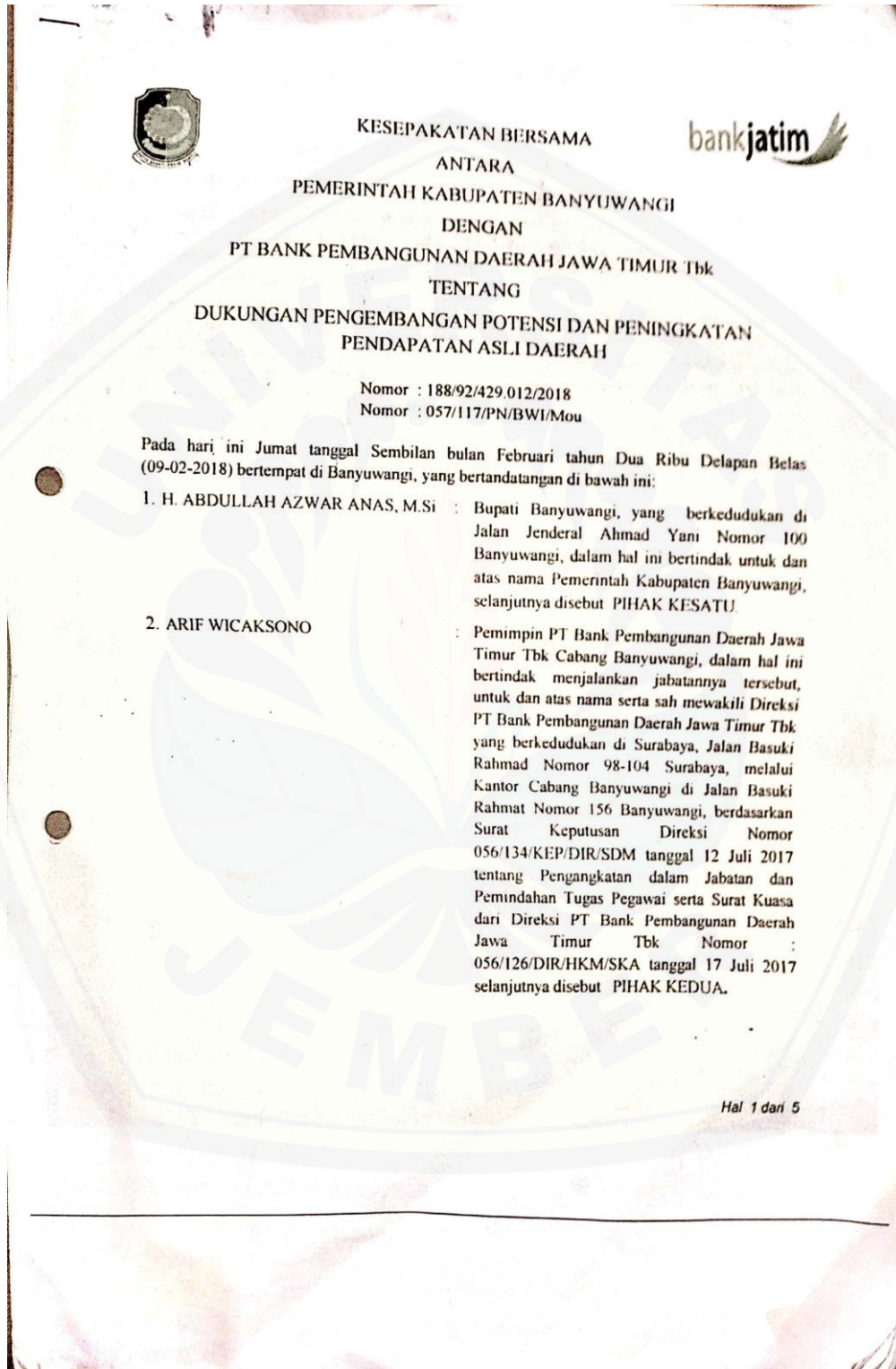
Pasal 16

- (1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Lampiran 5 Mou Pemerintah Banyuwangi dengan PT Bank Jatim Tentang Dukungan Pengembangan Potensi dan Peningkatan Pendapatan Daerah



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang berfungsi menghimpun retribusi dan pajak daerah serta menyelenggarakan administrasi retribusi dan pajak daerah, bermaksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
3. Bahwa dari hasil rapat tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama antara PARA PIHAK ke dalam suatu Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan pelayanan yang dimiliki PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online;
2. Pemanfaatan fasilitas layanan jasa dan produk perbankan;
3. Pemanfaatan layanan teknologi informasi;
4. Pemanfaatan Aset sebagai sarana layanan perbankan;
5. Bidang lain yang bisa dikembangkan oleh Kedua Belah Pihak.

Hal 2 dari 5

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal diketahui atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang menginginkan pengakhiran Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diputuskan oleh salah satu PIHAK sehingga Kesepakatan Bersama ini menjadi berakhir maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PEMBIAYAAN
PASAL 5**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 3 dari 5

PENUTUP
PASAL 8

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIF WICAKSONO



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Kondisi pasar blambangan sekarang



Fasilitas pendukung di pasar blambangan



Petugas dan pedagang pasar blambangan gotong royong membersihkan pasar blambangan setiap harinya



Pembinaan di pasar blambangan

